

ABSTRAK

Oktarina Sri Rahayu. NPM.19.81.0339. 2023. *Implementasi yuridis tentang peredaran dan penjualan obat codein di apotek kimia farma 111 Banjarbaru (studi kasus di apotek).* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH., Pembimbing II Dadin Eka Saputra, SH., M.Hum.

Kata kunci: *Peredaran dan Penjualan, Obat codein, Apotek kimia farma 111 Banjarbaru.*

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 21 juni 2023 hal ini sesuai dengan peneliti dapatkan datanya di lapangan bahwa persyaratan dalam menjual obat *codein* tersebut harus menggunakan resep asli. Namun masih ada pembelian tanpa resep dokter. Adanya kerjasama antara aparat dengan masyarakat untuk memberikan informasi dan edukasi kepada semua masyarakat terutama pada pasien yang mengkonsumsi dan terhadap Remaja penyalahgunaan Narkotika dengan cara memberikan Pendidikan Moral serta pendidikan yang tinggi.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana pengaturan perihal peredaran dan penjualan obat- obatan legal yang mengandung zat narkotika di Indonesia, Bagaimana penerapan hukum peredaran dan penjualan obat *codein* mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan Narkotika, psikotropika dan prekursor Farmasi pada Apotek kimia Farma 111 Banjarbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian ini adalah pihak Apoteker yang menangani penjualan obat *Codein*. Teknik sampling yang digunakan *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian di olah dengan teknik editing, klarifikasi dan interpretasi data-data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan metode deskriptif, kualitatif, secara induktif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan, peranan serta pertimbangan dari Apoteker dalam penyelesaian peredaran dan penjualan di Apotek kimia farma 111 Banjarbaru. sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan Narkotika, psikotropika dan prekursor Farmasi. Narkotika sesuatu yang dilarang dan disamping itu mempunyai manfaat yang Positif. Sesuai landasan yang telah diuraikan bahwa penjualan obat *Codein* itu dibolehkan jika terdapat izin dari Pemerintah terkait yang menaungi tentang Narkotika dan penjualannya terbatas hanya untuk seperlunya dan dalam pengawasan para ahli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anton M. Moelyono, (2023). kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka di akses tanggal 14 Juli.
- Anwar Arman, (2011). Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan, hlm., 14.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, (2015) *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Happy Elda Murdiana, (2019) *Pengantar Ilmu Farmasi*, (Yogyakarta: PT.Pustaka Baru).
- Hari sasangka, (2003). Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penuluh masalah Narkoba, mandar maju, Bandung di akses tanggal 14 juli 2023.
- Juliana Lisa FR. Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*,(Yogyakarta: Nuha Medika).
- Soedjono D, Segi Hukum Tentang Narkotika di indonesia, karya Nusantara Bandung di akses tanggal 14 juli 2023.
- Soedjono.D, (1977) Narkotika dan remaja, alumni Bandung
- Suharsimi Arikunto, (1985). *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Bina Aksara)
- Wilson Nadaek, korban dan masalah Narkotika, indonesia publing house, Bandung, di akses tanggal 14 juli 2023.
- Yudhi Widyo Armono,(2017) *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*, (Jakarta: t.p.tt),
- yusi dan idris, Accidental sampling, (2009:103), dapat di akses online pada, <http://eprints.polsri.ac.id/3040/2/BAB%201.pdf>, di akses pada tanggal 09 april 2023.

Website

Eprint. “4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Apotik definisi apotik menurut peraturan perundang-undangan” dapat di akses online pada <http://eprints.umg.ac.id/3446/3/4.BAB%20II.pdf> , di akses 09 april 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan Narkotika, psikotropika, dan prekursor Farmasi